

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Multinational Corporations (MNC) merupakan pelaku independen yang beroperasi di berbagai negara dan menjadi alat kebijakan luar negeri dari negara-negara dimana perusahaan induknya berada.¹ Adapun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Multinational Corporations* (MNC) sebagai perusahaan yang memiliki atau mengendalikan fasilitas produksi atau layanan di luar negara tempat induknya berbasis. Dalam hal tersebut, perusahaan terlibat dalam berbagai jenis operasi bisnis yang memiliki dampak dan implikasi kebijakan yang bervariasi bagi pemerintah asalnya. Legalitas hukum dari MNC berasal dari hukum pemerintah negara asal, tetapi perusahaan tersebut juga dibatasi oleh hukum negara-negara dimana mereka beroperasi.² Dalam ilmu hubungan internasional, *Multinational Corporations* (MNC) dikategorikan sebagai aktor non-negara karena memiliki kekuatan dan kemampuan dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.³

Seiring dengan perkembangan dunia yang kian tidak terbatas, sebagian besar MNC memiliki pandangan global dalam memperluas jaringan bisnis mereka yang melintasi batas-batas negara untuk menjaga daya saing. Adapun jumlah MNC yang ada di pasar global sudah tidak terhitung lagi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat dengan cepat.⁴

¹ Walters, Robert. S. (1972). *International Organizations and the Multinational Corporation: An Overview and Observations* (Vol. 403 Issue 1, pp. 1).

² United States General Accounting Office Report. (1978). *U.S. Foreign Relations and Multinational Corporations: What's the Connection? Report to The Congress of United States*". United States Government. pp. 2.

³ Sharma, Saumya. (2023). *Multinational Corporations as Powerful Non-State Actors in the Global South*. pp. 2.

⁴ National Research Council. (1998). *Global Economy, Global Technology, Global Corporations: Reports of a Joint Task Force of the National Research Council and the Japan Society for the Promotion of Science on the Rights and Responsibilities of Multinational Corporations in an Age of Technological Interdependence*. Washington, DC: The National Academies Press. pp. 94-97.

Setidaknya terdapat tiga peran MNC sebagai aktor non-negara di era globalisasi saat ini. Pertama, meningkatkan aliansi perusahaan internasional. Diketahui bahwa sejak berakhirnya era Perang Dingin, ekonomi dunia telah mengalami distorsi oleh intervensi politik. Meskipun pergesekan perdagangan pada saat itu berorientasi politik yang berkembang antara Jepang dan Amerika Serikat, kedua negara yang agresif tersebut tetap membentuk aliansi secara strategis dan mempromosikan kerjasama antarnegara.

Di era modern, MNC berupaya untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi mereka. MNC pun tidak lagi bisa bertahan hanya dengan mempertimbangan kepentingan nasional mereka saja, melainkan MNC perlu bekerjasama dengan negara lainnya dengan melakukan penelitian dan pengembangan secara global. Paradigma inovasi teknologi modern mengalami perubahan dengan cepat lantaran didorong oleh kebutuhan pasar dan inovasi terbaru. Oleh karena itu, untuk mengatasi paradigma tersebut, mayoritas MNC membentuk aliansi strategis yang melintasi batas nasional mereka untuk tetap bertahan.

Kedua, adanya peran-peran yang muncul dari MNC. Melalui aliansi bersama, diharapkan MNC dapat meningkatkan kolaborasi secara internasional. Saat ini, peran MNC pun mulai beralih menuju penciptaan era teknologi baru yang penerapannya diharapkan secara efektif dapat memecahkan berbagai masalah seperti lingkungan, pangan dan sebagainya agar dapat mencapai pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, meningkatkan keamanan nasional secara komprehensif. Melalui upaya untuk meningkatkan keamanan nasional yang komprehensif, diharapkan pula dapat menyelaraskan kekuatan ekonomi, teknologi dan militer dengan konsep keamanan nasional saat ini, terlebih keamanan nasional erat kaitannya dengan kepentingan nasional suatu negara. Adapun contoh kasus yang serupa adalah melalui kemajuan industri Jepang saat ini. Diketahui, Jepang merupakan salah satu negara yang menggantungkan sebagian besar sumber daya alam, energi dan makanan melalui negara lain. Selain itu, Jepang tidak memiliki kekuatan militer untuk menyerang negara lain hanya untuk kepentingan tertentu. Namun, satu hal

yang pasti adalah Jepang memilih untuk bertahan dan menjaga hubungan baik dengan industri global.

Jepang percaya bahwa pola pikir mengenai keamanan nasional harus diubah. Adapun kekuatan militer saja tidak lagi dapat menjamin perdamaian dunia seperti yang sudah terbukti dalam sejarah. Negara-negara yang kuat secara militer mungkin dapat menjamin keamanan nasional mereka walaupun secara tidak langsung dapat mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan keamanan negara lain. Oleh karena itu, keamanan nasional yang komprehensif harus dipromosikan dan semua upaya harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir perdamaian dunia.

Sayangnya, masih terdapat MNC sebagai aktor non-negara yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara, salah satunya adalah kasus serangan siber dan spionase yang dialami oleh Amerika Serikat. Diketahui bahwa negara tersebut merasa terancam oleh adanya penerapan teknologi baru 5G yang dilakukan oleh Huawei dan diduga sebagai skenario baru oleh pemerintah Tiongkok. Menurut Mike Pompeo selaku Menteri Sekretaris Negara Amerika Serikat (2018-2021) menyatakan bahwa *“This is what exactly China wants, they want to divide western alliances through bits and bytes, not bullets and bombs”* yang artinya *“Ini adalah apa yang tepatnya diinginkan oleh China, mereka ingin membagi aliansi barat melalui bit dan byte, bukan peluru dan bom”*.⁵

Diketahui, Huawei merupakan *Multinational Corporations* (MNC) asal Tiongkok yang bergerak di bidang peralatan, pelayanan jaringan dan telekomunikasi. Huawei pertama kali berdiri pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei yaitu seorang mantan perwira dan insinyur di Tentara Pembebasan Rakyat China. Pada awalnya, Huawei bergerak di bidang penjualan produk sakelar telepon yang diproduksi oleh perusahaan dari Hong Kong. Lalu pada tahun 1990-an, Huawei mulai melakukan penelitian dan mengembangkan peralatan jaringan seluler sehingga menghasilkan jaringan seluler CDMA pertama di Tiongkok pada tahun 1995. Hingga akhirnya, pada tahun 2000an Huawei mulai melakukan ekspansi ke

⁵ The Economist. (2019). *Is America right to fear Huawei*. Diunggah oleh Kanal Youtube the Economist Pada 13 November 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=1y1leTbizgU>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

pasar internasional dan berhasil menjadi salah satu produsen utama di pasar peralatan jaringan seluler global dan beroperasi di lebih dari 170 negara.⁶

Huawei mulai memasuki pasar Amerika Serikat pada Februari 2001 dan semakin berkembang pesat hingga berjajar dengan produk Samsung dan Apple. Selain itu, Huawei telah membangun lebih dari 1.500 jaringan di seluruh dunia dan menghubungkan sepertiga populasi planet ini. Adapun pada tahun 2018, Huawei mengklaim pendapatannya sekitar \$107 miliar.⁷

Namun, di tengah kesuksesan komersial yang diraih oleh Huawei di Amerika Serikat, Huawei dihadapkan pada berbagai tuduhan melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan. Kontroversi tersebut dimulai pada tahun 2003, ketika Cisco Systems menggugat Huawei atas pelanggaran paten dan menyalin kode perangkat lunak secara ilegal, namun akhirnya gugatan tersebut di batalkan. Lalu pada tahun 2012, para legislator Amerika Serikat memperingatkan Huawei dan ZTE terkait resiko keamanan dalam jangka panjang dan berakhir tanpa menemukan pelanggaran hukum. Meskipun demikian, para legislator tetap memiliki kekhawatiran terkait penyediaan peralatan oleh Huawei dan ZTE untuk infrastruktur penting Amerika Serikat yang dapat membahayakan kepentingan keamanan nasional inti Amerika Serikat.⁸

Terakhir, dampak yang paling mengguncang eksistensi Huawei adalah ketika pelarangan terhadap produknya secara resmi dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada 15 Mei 2019. Bahkan, Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan mengatakan bahwa *“Huawei is something that's very dangerous you look at what they've done from a security standpoint from a military standpoint it's very dangerous so it's possible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal if we made a deal I could imagine while way being possibly included in some form of or some part of a trade you”* yang artinya

⁶ Huawei Official Website. (2018). *Who is Huawei*. <https://www.huawei.com/minisite/whoishuawei/journey.html>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

⁷ CNBC International. (2019). *What is Huawei? CNBC Explains*. Diunggah oleh Kanal Youtube CNBC International Pada 19 April 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=LdmGu2DLuQA&t=87s>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

⁸ Lahiri, Tripti., Hui, Mary. (2019). *How Huawei became America's tech enemy No.1*. <https://qz.com/1627149/huaweis-journey-to-becoming-us-tech-enemy-no-1>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

“Huawei adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika anda melihat apa yang telah mereka lakukan dari segi keamanan dan segi militer, ini sangat berbahaya. Jadi mungkin saja Huawei bahkan akan dimasukkan dalam jenis perjanjian dagang jika kita mencapai kesepakatan. Saya bisa membayangkan Huawei mungkin akan dimasukkan dalam beberapa bentuk atau bagian dari kesepakatan dagang”.⁹

Menurut James A. Lewis selaku Senior Vice President di Centre for Strategic and International Studies menuturkan bahwa *“We’re moving to a world where everything will be connected to the internet, but we haven’t thought enough about security. That’s the big fear about having a hostile power control your 5G network”* yang artinya “Kita sedang bergerak ke dunia di mana segala hal akan terhubung ke internet, namun kita belum cukup memikirkan tentang keamanan. Itulah yang menjadi ketakutan besar tentang memiliki kekuatan musuh yang mengendalikan jaringan 5G”. Hal ini lantaran, apabila jaringan teknologi masih rentan terhadap keamanan maka akan membuka peluang bagi negara-negara untuk saling memata-matai.

Melalui adanya tekanan yang dihadapi oleh Huawei, Ren Zhengfei selaku penemu dan CEO Huawei menyatakan bahwa *“I do not really understand America’s political motivation, 5G is just a type of technology or product. It is simply a tool and it would be a mistake to politicise 5G”* yang artinya “Saya tidak benar-benar memahami motivasi politik Amerika, 5G hanyalah jenis teknologi atau produk. Ini hanyalah alat dan akan menjadi kesalahan jika 5G dipolitisasi”. Namun, hal tersebut dibantah oleh adanya pernyataan James A. Lewis yang menyatakan bahwa salah satu strategi Huawei dapat mengalahkan pesaing-pesaingnya adalah karena Huawei mendapat subsidi oleh pemerintah Tiongkok.¹⁰ Pernyataan tersebut sejalan menurut Robert Strayer selaku wakil asisten sekretaris negara Amerika Serikat bidang kebijakan siber dan komunikasi internasional serta kebijakan informasi yang mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara sektor swasta dalam perusahaan dan pemerintah di Tiongkok. Terlebih adanya

⁹ France 24 English. (2019). *Huawei is something that is very dangerous, Says Trump*. Diunggah oleh Kanal Youtube France 24 English Pada 24 Mei 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=spsr4xMj1Vo>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

¹⁰ Ibid., The Economist.

penerapan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Intelijen Nasional dan Undang-Undang lain yang ada dalam penguasaannya, dapat memaksa perusahaan untuk bertindak. Sehingga tidak ada cara bagi perusahaan tersebut untuk melawan dan menggunakan hak gugatan yudisial independen. Oleh karena itu, perusahaan tersebut sepenuhnya tunduk pada arahan Partai Komunis Tiongkok dan Xi Jinping.¹¹

Adapun bentuk kesetiaan perusahaan swasta terhadap pemerintah Tiongkok diatur dalam Undang-Undang Intelijen Tiongkok Pasal 7, penambahan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Setiap organisasi dan warga negara wajib mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen nasional sesuai dengan hukum, dan wajib melindungi rahasia pekerjaan intelijen nasional yang mereka ketahui”. Para kritik mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut berarti bahwa ketika seseorang membeli peralatan teknologi dari Huawei maka akan membuka kemungkinan besar terhadap pemantauan yang dilakukan oleh intelijen Tiongkok dan hal ini membuat Amerika Serikat merasa sangat tidak nyaman.¹²

Selain adanya ancaman terhadap teknologi 5G yang tengah dikembangkan oleh Huawei. Pada dasarnya, terdapat kekhawatiran lain yang dihadapi oleh Huawei yaitu adanya ketergantungan pada rantai pasokan global, khususnya dari Amerika Serikat sendiri. Sebagai contoh pada rata-rata smartphone di dunia, beberapa diantaranya mengandung komponen lebih dari 200 pemasok internasional. Adapun layar smartphone dapat dibuat oleh Samsung di Korea Selatan, lensa kamera dirancang di Jerman, chip bisa dirancang oleh perusahaan yang berbasis di California dan diproduksi di Taiwan, baterai dapat berasal dari Jepang hingga chip audio berasal dari Tiongkok. Namun, semakin intensnya sikap permusuhan dan kurang kepercayaan, maka akan mengancam rantai pasokan tersebut.¹³

¹¹ PBS NewsHour. (2019). *Why the Trump administration is so concerned about Huawei*. Diunggah oleh Kanal Youtube PBS NewsHour Pada 15 Mei 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=FY8KVEJIHkg&t=444s>. Diakses Pada 31 Oktober 2023.

¹² The Economist. (2019). *Is America right to fear Huawei?*. Diunggah oleh Kanal Youtube The Economist Pada 13 November 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=1yIleTbizgU>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

¹³ Ibid., The Economist.

Oleh karena itu, melalui pelarangan produk yang diterima Huawei secara *de facto* dapat berdampak kepada perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat untuk bekerjasama atau menjual produk kepada Huawei. Seperti Google yang telah mencabut lisensi Android, Intel yang telah mencabut lisensi prosesor dan Qualcomm yang telah mencabut lisensi microchip. Selain itu, terdapat larangan operator jaringan Amerika Serikat seperti Verizon, AT&T dan T-Mobile untuk membeli peralatan jaringan Huawei dan membangun jaringan mereka.¹⁴

Selain penerapan larangan terhadap perusahaan-perusahaan swasta, Amerika Serikat juga mengintervensi negara lain agar melakukan pelarangan terhadap produk Huawei. Menurut Robert Strayer, Amerika Serikat memastikan bahwa mereka akan terus mengupayakan pembicaraan dengan para sekutu seperti Inggris, Australia, New Zealand, Kanada. Meskipun pada awalnya Inggris merespon bahwa mereka akan memperketat sistem keamanan dan tidak setuju dengan pendapat Amerika Serikat. Lebih lanjut, Robert Strayer mengatakan bahwa mereka akan terus membuka mata para sekutu dan memberi pemahaman akan resiko keamanan yang akan mengancam negara-negara di dunia.¹⁵

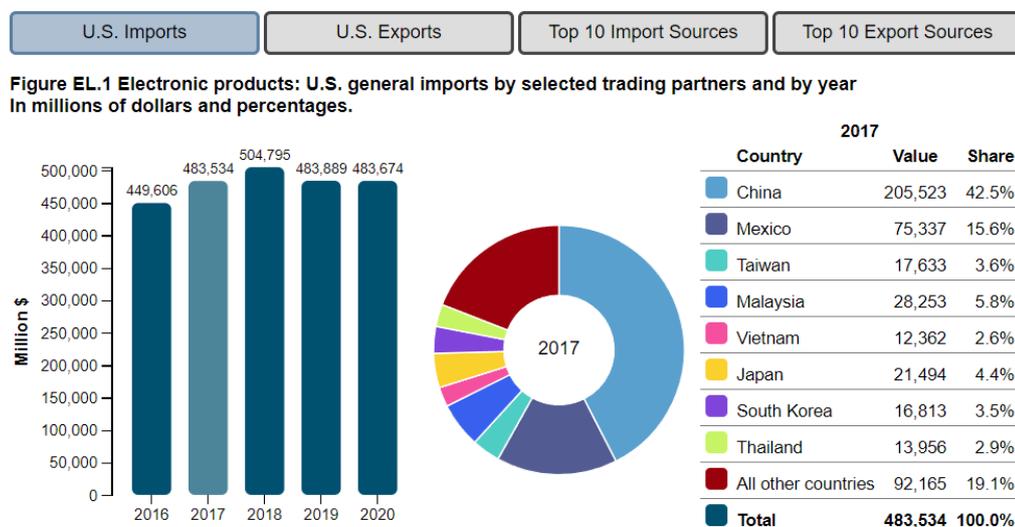
Sebagai upaya melindungi keamanan negara, Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (2017-2021) memberlakukan kebijakan pelarangan produk Huawei yakni menambahkan Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) ke dalam daftar entitas *The Export Administration Regulations* (EAR) atau Peraturan Administrasi Ekspor yang diatur oleh *The Bureau of Industry and Security* (BIS) karena dapat membawa resiko yang signifikan dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.¹⁶

¹⁴ TechAltar. (2020). *1 year later - Did the Huawei ban work?*. Diunggah oleh Kanal Youtube TechAltar Pada 5 Agustus 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=cqILB-3aCUg&t=232s>. Diakses Pada 3 Oktober 2023.

¹⁵ PBS NewsHour. (2019). *Why the Trump administration is so concerned about Huawei*. Diunggah oleh Kanal Youtube PBS NewsHour. 15 Mei 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=FY8KVEJHkg&t=444s>. Diakses Pada 31 Oktober 2023.

¹⁶ Federal Register US Government. (2019). *Addition of Entities to the Entity List*. <https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/21/2019-10616/addition-of-entities-to-the-entity-list>. Diakses Pada 3 Desember 2023.

Pada dasarnya, pelarangan terhadap produk Huawei merupakan strategi yang digunakan oleh mantan Presiden Donald Trump dalam penyelesaian masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2018. Diketahui di tahun sebelumnya, Amerika Serikat telah mengekspor sejumlah produk ke Tiongkok seperti pesawat, kedelai dan mobil dengan nilai sekitar US\$ 130 miliar. Sedangkan, nilai impor Amerika Serikat dari Tiongkok sekitar US\$ 505 miliar yang terdiri dari produk elektronik, pakaian dan mesin.¹⁷ Dengan kata lain, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan. Sebagai contoh pada tahun 2017, Tiongkok menjadi negara terdepan dalam mengekspor produk elektronik ke Amerika Serikat dengan nilai 42,5%.¹⁸



Gambar 1.1 Data negara importir produk elektronik ke Amerika Serikat tahun 2017

Sumber : US International Trade Commission

Donald Trump yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha melihat fenomena tersebut sebagai ancaman dan memandang Tiongkok sebagai musuh ekonomi utama Amerika Serikat. Oleh karena itu, Donald Trump menyatakan bahwa Tiongkok telah melakukan upaya pencurian dan memanfaatkan pasar

¹⁷ Kimberly Amadeo. (2022). *Trade Wars and Their Effect on the Economy and You*. <https://www.thebalancemoney.com/trade-wars-definition-how-it-affects-you-4159973>. Diakses Pada 15 Februari 2024.

¹⁸ United States International Trade Commission. (2020). *Electronic Product*. https://www.usitc.gov/research_and_analysis/tradeshifts/2020/electronic.htm. Diakses Pada 13 Maret 2024.

Amerika Serikat. Melalui Strategi Keamanan Nasional tahun 2017, Donald Trump mengkritik Tiongkok sebagai negara yang menantang kekuatan, pengaruh dan kepentingan Amerika dalam upaya memberantas keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat.¹⁹

Melalui kampanye Donald Trump pada tahun 2016 bertajuk “*Make America Great Again*” yang terinspirasi dari kampanye mantan presiden Ronald Reagan pada tahun 1980 yang bertajuk “*Let’s Make America Great Again*” dengan tujuan agar dapat menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat yang mengalami stagflasi. Hal inilah yang membentuk perspektif Donald Trump terhadap peningkatan perekonomian Amerika Serikat melalui perdagangan global salah satunya dengan Tiongkok. Upaya proteksionisme yang dilakukan oleh Donald Trump didasari oleh kecenderungan warga Amerika Serikat yang gemar membeli produk buatan Tiongkok karena memiliki harga produk yang lebih rendah dibandingkan dengan produk buatan Amerika Serikat. Melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua negara *super power* tersebut memiliki kekuatan khususnya dalam bidang ekonomi dan teknologi global.

Dengan kata lain, Huawei menjadi bagian sentral dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat dianggap telah membenarkan tindakannya terhadap Huawei berdasarkan dugaan keamanan nasional. Namun banyak yang meyakini bahwa hal ini sebagai upaya untuk mengendalikan perusahaan swasta Tiongkok yang dianggap kuat dan memiliki jaringan yang luas. Terlebih Amerika Serikat memiliki kecenderungan untuk menjadi negara terdepan dalam bidang ekonomi dan penguasaan teknologi. Meskipun Amerika Serikat menganut sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan usaha. Namun, Donald Trump dianggap telah melawan sistem tersebut dengan melarang peredaran produk Huawei dan menggaungkan perang dagang dengan Tiongkok. Donald Trump secara terang-terangan mengatakan bahwa Huawei dapat menjadi bagian dari kesepakatan

¹⁹ Mildner, Stormy-Annika., Schmucker, Claudia. (2019). *Making America Great Again versus Made in China*. (Nr.2. DGAP Analysis). pp. 7.

perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia. Namun, prospek kesepakatan tersebut ternyata semakin menjauh, terutama dalam jangka pendek.²⁰

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka muncul ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dan menuangkan dalam suatu penelitian yang berjudul : “Dampak Kebijakan Donald Trump Terhadap Pelarangan Produk Huawei di Amerika Serikat” sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai alasan dibalik kebijakan perintah eksekutif yang dicetuskan oleh mantan Presiden Donald Trump terhadap operasi bisnis Huawei dan industri teknologi global di abad ke-21 sebagai upaya meningkatkan keamanan nasional dan proteksionisme. Terlebih, Huawei merupakan MNC yang memiliki signifikansi besar terhadap Tiongkok. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperbaiki hubungan perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengelaborasi penggunaan teori realisme yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dalam karya yang berjudul “*Politics Among Nations*” yang menyatakan bahwa konsep realisme merupakan hubungan secara psikologis antara pihak yang menjalankannya dan pihak yang menjadi subjeknya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pihak pertama atas kendali dan tindakan tertentu kepada pihak kedua yang mendapatkan pengaruh tersebut. Adapun pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan cara perintah, ancaman, persuasi atau kombinasi dari semuanya. Melalui teori realisme, dapat tercermin upaya Amerika Serikat dalam mempertahankan kepentingan nasional, kekuasaan dan keamanan dalam sistem internasional. Oleh karena itu, Donald Trump memberlakukan berbagai kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai upaya melindungi keamanan nasional dan proteksionisme. Selain itu, Amerika Serikat berupaya untuk mengintervensi berbagai perusahaan swasta dan negara lain agar tidak bekerja sama dengan Huawei. Hal ini tentunya dapat menunjukkan upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya di bidang ekonomi dan

²⁰ Ana Nicolaci da Costa. (2019). *How damaging is the Huawei row for the US and China?*. <https://www.bbc.com/news/business-48361473>. Diakses Pada 3 Oktober 2023.

penguasaan teknologi global serta menggambarkan situasi dunia yang diwarnai dengan kompetisi.²¹

Selain itu, penulis menggunakan konsep *non-traditional security* yang dikemukakan oleh Mely Caballero-Anthony dalam karya yang berjudul “*An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*” yang menyatakan bahwa *non-traditional security* berpusat pada ancaman non-militer. Adapun *non-traditional security* menyoroti pentingnya menganalisis isu-isu yang terjadi di berbagai tingkat analisis, dimana tidak hanya aktor negara saja yang terlibat sebagai entitas politik tetapi aktor non-negara, kelompok masyarakat sipil, individu dan komunitas yang terlibat dalam peristiwa *non-traditional security*. Selain itu, *non-traditional security* berperan dalam mendorong sikap yang lebih proaktif terhadap risiko-risiko dan ancaman baik yang ada, sedang berkembang dan potensial dalam lingkup masyarakat salah satunya melalui MNC. Melalui konsep *non-traditional security*, dapat tercermin bentuk ancaman yang muncul di luar ranah militer tradisional yaitu ancaman teknologi. Melalui kebijakan Donald Trump terhadap Huawei, dapat dilihat bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat dari ancaman non-tradisional yang ditimbulkan oleh Huawei (MNC) sebagai aktor non-negara tersebut.²²

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Huawei merupakan *Multinational Corporations* (MNC) asal Tiongkok yang bergerak di bidang peralatan, pelayanan jaringan dan telekomunikasi. Namun, eksistensi Huawei mengalami guncangan ketika pelarangan terhadap produknya secara resmi dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada 15 Mei 2019. Adapun kebijakan tersebut diambil oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai upaya melindungi keamanan nasional dan proteksionisme. Selain terdapat motif Huawei dalam pengembangan teknologi 5G yang berpotensi rentan terhadap

²¹ Morgenthau, Hans J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace First Edition*. New York: Alfred A. Knopf.

²² Caballero-Anthony, Mely. (2016). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*. India: Replika Press Pvt Ltd.

keamanan terdapat pula upaya yang dilakukan Donald Trump dalam memproteksi sistem perekonomian karena mengalami defisit pada tahun 2018. Meskipun Huawei menyangah pernyataan tersebut, namun Amerika Serikat tetap akan melarang peredaran produk Huawei. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap berbagai perusahaan swasta dan negara lain agar tidak bekerja sama dengan Huawei. Para ahli berpendapat bahwa pelarangan produk Huawei merupakan alat propaganda yang digunakan oleh mantan Presiden Donald Trump dalam penyelesaian masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2018. Dalam mencermati fenomena pelarangan produk Huawei di Amerika Serikat tersebut penulis mengidentifikasi sejumlah masalah antara lain:

- A. Huawei merupakan *Multinational Corporations* (MNC) asal Tiongkok yang tengah mengembangkan teknologi 5G. Namun, teknologi terbaru tersebut dinilai tidak aman karena mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Oleh karena itu, pada 15 Mei 2019 Amerika Serikat secara resmi melarang produk Huawei beredar di negaranya.
- B. Pelarangan terhadap peredaran produk Huawei di Amerika Serikat dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan Huawei sendiri dan industri teknologi global.
- C. Terdapat upaya Amerika Serikat dalam mengintervensi berbagai perusahaan swasta dan negara lain agar tidak bekerjasama dengan Huawei.
- D. Melalui kampanye “*Make America Great Again*” Donald Trump memiliki ambisi untuk melakukan peningkatan perekonomian melalui proteksionisme. Meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan sistem ekonomi kapitalis yang dianut oleh Amerika Serikat.
- E. Penelitian ini menjadi penting karena fenomena ancaman terhadap negara lain tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara melalui perang konvensional saja, melainkan dapat dilakukan oleh aktor non-negara melalui serangan siber dan perekonomian yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara di seluruh dunia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Pertanyaan Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan pokok penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- A. Apa saja faktor penyebab pelarangan produk Huawei di Amerika Serikat?
- B. Bagaimana dampak kebijakan Donald Trump terhadap pelarangan produk Huawei di Amerika Serikat?
- C. Bagaimana strategi Huawei agar tetap dapat menjalankan operasi bisnis ditengah larangan peredaran produknya di Amerika Serikat?

1.3.2 Pertanyaan Operasional Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan operasional penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perspektif dampak kebijakan Donald Trump terhadap pelarangan produk Huawei di Amerika Serikat melalui teori realisme dan konsep *non-traditional security*?

1.4 Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor penyebab pelarangan produk Huawei di Amerika Serikat.
- B. Untuk mengetahui dampak kebijakan Donald Trump terhadap pelarangan produk Huawei di Amerika Serikat.
- C. Untuk menganalisa strategi Huawei agar tetap dapat menjalankan operasi bisnis ditengah larangan peredaran produknya di Amerika Serikat.
- D. Untuk mengetahui perspektif dampak kebijakan Donald Trump terhadap pelarangan produk Huawei di Amerika Serikat melalui teori realisme dan konsep *non-traditional security*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran baik secara praktis maupun secara teoritis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- A. Kegunaan praktis: Memberikan referensi dan pengetahuan terhadap peneliti selanjutnya sehingga akan mendapatkan pembahasan yang lebih optimal terkait penelitian sejenis dikemudian hari.
- B. Kegunaan teoritis: Memberikan sumbangan bagi pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan teori realisme dan konsep *non-traditional security* terkait praktek pelarangan produk oleh MNC tertentu dan proteksionisme di dalam sistem global.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan gambaran pokok dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat lima bagian sub pembahasan, diantaranya pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan. Adapun penjelasan setiap bab dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab pertama, penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian dalam bentuk identifikasi masalah yang berkaitan dengan topik yang diteliti, pertanyaan penelitian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu pertanyaan pokok dan pertanyaan operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian yang menjadi bahan pembahasan pada bagian pendahuluan.

BAB II (KAJIAN PUSTAKA)

Pada bab kedua, penulis akan menguraikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pelarangan MNC tertentu di suatu negara sebagai upaya perlindungan terhadap keamanan negara. Selain itu, bab kedua akan menjelaskan teori yang digunakan sebagai landasan berpikir yang mengarah pada penyelesaian

masalah dan kerangka pemikiran yang menjadi acuan penelitian tanpa mengurangi makna teori yang digunakan.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Pada bab ketiga, penulis akan menjelaskan proses penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pendekatan penelitian yang digunakan, peneliti juga menjelaskan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, jadwal penelitian serta aspek, dimensi dan parameter penelitian.

BAB IV (DAMPAK KEBIJAKAN DONALD TRUMP TERHADAP PELARANGAN PRODUK HUAWEI DI AMERIKA SERIKAT)

Pada bab keempat, penulis memaparkan hasil dan pembahasan penelitian dalam bab ini berupa temuan-temuan penelitian. Adapun bab keempat merupakan instrumen penting dari keseluruhan penelitian ini.

BAB V (KESIMPULAN)

Pada bab kelima, berisi penutup yakni kesimpulan yang diajukan oleh penulis. Penulis memaparkan simpulan dari hasil penelitiannya dan saran yang diharapkan dapat memberikan hal yang baik serta manfaat dan pengarahannya terhadap penulis yang akan membahas topik yang sama selanjutnya. Selanjutnya pada bagian akhir, yakni daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang menguatkan data analisis.